

LITERATUR REVIEW: ANALISIS RESOLUSI KONFLIK DI INDONESIA

Fitri

Universitas Gadjah Mada

E-mail: ffitrii99.19@gmail.com

ABSTRAK

Pemicu konflik dapat berupa kepentingan yang berbeda antara pihak-pihak yang berkonflik. Salah satu wujud konflik di Indonesia seperti konflik masyarakat dan perusahaan serta konflik kelas. Penelitian ini merupakan literature review yang berfokus pada resolusi konflik di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan konflik di Indonesia tidak hanya dipicu karena kepentingan namun juga ini menguagai sumber daya alam yang ada. Keterlibatan pemerintah dalam membantu resolusi konflik menjadi penting dalam membuat kebijakan untuk memitigasi dampak konflik. Resolusi konflik di Indonesia berfokus pada negosiasi dan mediasi, namun konflik yang telah melibatkan kekerasan memerlukan intervensi dari pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Kata kunci: Resolusi Konflik, Konflik Masyarakat dan Perusahaan, Konflik Kelas

ABSTRACT

Conflict triggers can be different interests between conflicting parties. Conflicts in Indonesia include community and corporate conflicts and class conflicts. This research is a literature review that focuses on conflict resolution in Indonesia. The results of the analysis show that conflicts in Indonesia are not only triggered by interests but also the control of existing natural resources. Government involvement in assisting conflict resolution is important in making policies to mitigate the impact of conflict. Conflict resolution in Indonesia focuses on negotiation and mediation, but conflicts that have involved violence require the intervention of a third party to resolve the conflict.

Keywords: Conflict Resolution, Community and Company Conflicts, Class Conflicts.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya kepentingan dan kebutuhan setiap individu atau kelompok yang berbeda dapat memicu konflik seperti pada konflik agraria atau lahan di Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia (2023), Konsursium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan konflik yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023 sebanyak 241 kasus. Wilayah yang terdampak seluas 638,200 Ha yang terdiri dari proyek infrastruktur, tambang, perkebunan, kehutanan, bisnis properti, wisata pantai dan fasilitas militer yang memberi dampak pada 135,600 kepala keluarga (Hidayat, 2024). Kasus tersebut dapat menunjukkan bentuk-bentuk konflik yang beragam dari orasi fisik atau kampanye media hingga tidak dapat dikendalikan seperti kekerasan. Eskalasi terjadi tergantung dengan pemicu konflik dan keterlibatan resolusi di dalamnya.

Pemicu konflik yang beragam memerlukan resolusi konflik yang beragam pula, namun IPAC (2013) mengungkapkan lahan atau tanah sebagai sumber utama konflik kekerasan (Kinseng, 2022). Indonesia sendiri telah memiliki konstitusi yang mengatur mengenai sumber daya alam dikuasai negara yang digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (UUD 1945 Pasal 33 (3)), nyatanya sumber daya tersebutlah yang menjadi pemicu utama konflik.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia menyebabkan konflik beragam seperti konflik masyarakat dan perusahaan hingga konflik kelas yang terjadi pada kelompok nelayan. Wujud konflik umumnya diawali dengan protes fisik ataupun kampanye media namun dapat berakhir pada kekerasan dan penentuan yang menang dan kalah. Resolusi konflik dapat dimulai dari negoasiasi dan mediasi, namun kegagalan

juga memungkinkan eskalasi konflik yang semakin tinggi bahkan terjadi kekerasan di dalamnya. Kekerasan yang terjadi bukan berarti konflik jadi tidak bisa dikendalikan namun kehadiran kekerasan pada konflik dapat mendorong perdamaian karena masyarakat dipaksa menyelesaikan konflik tersebut (Bouvier & Smith, 2016). Diperlukan resolusi konflik dengan pendekatan yang berbeda untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Tujuan penelitian ini akan menganalisis resolusi yang digunakan dalam mencegah eskalasi konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resolusi Konflik

Konflik sebagai bagian dari individu bahkan kelompok yang terus berkembang karena kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dinegoasiasikan (Burton, 1993), sehingga diperlukan penyelesaian atas konflik tersebut. Penyelesaian konflik dapat berupa pemusnaan atau penyerahan salah satu pihak karena tidak adanya solusi atas permasalahan dari pihak yang bertikai dalam jangka waktu yang realtif lama dan dilakukan pembagian kekuasaan untuk mengakhiri konflik, serta dibentuk komisi untuk menyelesaikan konflik dan dilakukan rekonsiliasi kepada pihak-pihak yang berkonflik (Wagner-Pacifici & Hall, 2012).

Wagner-Pacifici dan Hall (2012), menyatakan bahwa analisis pada sebuah konflik melalui tingkat mikro dan makro, namun pada sudut pandang lokal serta masyarakat dan membandingkannya dengan swasta atau publik, serta dapat menggunakan pandangan formal dan informal. Dalam lensa mikroanalitik, konflik muncul sebagai aktivitas tuntutan yang berpola dan interaktif terutama bersifat ekspresif dan episodic dan konflik yang kurang terkendali dengan penyelesaian rasional. Dalam konflik makroanalitik terdapat tiga model yang mendasar yaitu model tawar menawar, birokrasi dan sistem. Manejer mampu mengidentifikasi dan melibatkan konflik yang relevan sehingga akan berfokus pada penyelesaian dan pemicu konflik yang

dapat keuntungan kinerja perusahaan. Memahami struktur dan proses dinamis konflik sosial terdapat ontology sosial diberbagai tingkatan model pada empat fasenya yaitu pelanggaran, krisis, ganti rugi dan rekonsiliasi.

Resolusi dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti perjanjian yang dimediasi, penarikan diri oleh salah satu atau kedua belah pihak, kompromi, penyerahan diri, peletakan senjata, perjanjian damai, gencatan senjata, konstitusi, pengadilan, amnesti (membangkitkan sikap memaafkan), pengampunan, pembersihan, perjanjian internasional, permintaan maaf, hukum, perubahan topik argumen, dan reparasi. Dalam resolusi juga terdapat resolusi khusus yaitu pembuatan konstitusi yang bertujuan untuk melakukan reorientasi dan konfigurasi ulang negara yang sedang mengalami transisi

Resolusi konflik membutuhkan intervensi, mediator ataupun pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik. Salah satu isu kontroversional mengenai mediasi konflik adalah netralitas mediator sehingga terdapat kritik kualitas kode etik paradoks. Mengkritik peran mediator atau intervensi tentang peran ini sering memasukkan kembali kontrol otoritatif dalam proses yang tampaknya informal dan alternatif (Wagner-Pacifici & Hall, 2012). Hal serupa juga disampaikan oleh Kriesberg (2009), perdebatan mengenai resolusi konflik masih terjadi dan faktor eksternal dan internal menjadi permasalahan yang diperdebatan pada resolusi konflik kontemporer dengan isu utama mengenai perbedaan perspektif peran mediator. Beberapa pihak menekankan netralitas mediator dan proses mediasi sementara yang lain fokus pada pencapaian hasil yang adil ketika mediasi.

Resolusi konflik tidak hanya mengenai cara negosiasi atau bentuk mediasi, tetapi gaya konfrontasi dan aspek-aspek lain juga mempengaruhi berdasarkan variasi konflik seperti budaya, tradisi agama, kelas sosial dan kelompok sosial lainnya yang berbeda. Proses dalam resolusi konflik harus menunjukkan pengungkapan kebenaran walaupun akan melibatkan sebuah

perubahan identitas partisipasinya melalui rekonsiliasi. Norval dan Borer (dalam Wagner-Pacifici & Hall, 2012), menyatakan bahwa semua rekonsiliasi harus melakukan pengungkapan kebenaran dan pembuatan prosedur serta aturan untuk perdamaian berkelanjutan. Pengungkapan kebenaran dapat menjadi titik balik dalam penyelesaian konflik sosial.

Resolusi konflik sosial yang disampaikan oleh Wagner-Pacifici dan Hall (2012) terbagi atas empat sudut tema yaitu

- a. **Kekerasan** pada konflik sosial bervariasi dalam intensitas dan bentuknya, mulai dari terkoordinasi hingga menjadi kacau. Perdebatan mengenai hubungan kekerasan ekstrem dalam konflik dan peluang rekonsiliasi. Sebagian berpendapat bahwa kekerasan ekstrim dapat mengurangi prospek rekonsiliasi. Sebagian lainnya mengikuti pola dan tingkat kekerasan yang berbeda dalam konflik kontemporer.
- b. **Bahasa**, konflik sosial juga melibatkan bahasa sebagai komponen utama, dalam resolusi konflik khususnya pada wacana negoasiasi, urutan narasi dan etika wacana. Semuanya berkontribusi pada dinamika manajemen konflik. Penggunaan bahasa dalam wacana aktif ataupun melalui keheningan akan membentuk hasil konflik dan negoasiasi dalam berbagai konteks sosial
- c. **Ruang resolusi konflik**, konflik sosial sering kali memiliki konteks spasial dan melibatkan perselisihan atas wilayah. Penyelesaian konflik sosial terjadi di ruang dan tempat tertentu. Ruang dapat berupa metepora, yang bertumpu pada gagasan tentang jarak sosial. Sifat konflik yang terdeteritorialisasi ini memiliki konsekuensi yang lebih luas terhadap orientasi sosial dan lokasi sehingga menjadi masalah bagi para ahli yang mengusulkan bahwa manajemen konflik bergantung pada

lokasi dan arah salam ruang sosial. Kemampuan mengkalibrasi jarak sosial sebagaimana dirusak oleh deteritorialisasi konflik.

- d. **Temporalitas resolusi konflik**, kemampuan untuk membedakan antara periode konflik dan pasca-konflik dikelola secara berbeda oleh berbagai mekanisme resolusi. Waktu itu sendiri menjadi media resolusi dengan pelupaan yang terkadang mengarah pada resolusi. Pelupaan dan amnesti memiliki efek yang bervariasi dengan keseimbangan antara mengingat dan melupakan menjadi penting.

Wagner-Pacifici dan Hall (2012), menjelaskan terdapat perbedaan signifikan antara resolusi yang mengantisipasi dan menghasilkan pihak yang kalah dan menang dengan resolusi yang mengharapkan dan bertujuan untuk kompromi dan penyelesaian melalui negosiasi. Resolusi konflik yang digunakan ditentukan berdasarkan konflik apa yang sedang terjadi, sehingga perlu dilakukan analisis mendalam mengenai resolusi. Salah satu konflik yang terjadi di Indonesia yaitu konflik masyarakat dan perusahaan serta konflik kelas pada kelompok nelayan.

1. Konflik Masyarakat dan Perusahaan

Konflik masyarakat dan perusahaan umumnya disebabkan karena persaingan atas hak milik tanah atau lahan. Konflik masyarakat dan perusahaan di Indonesia 87% melibatkan perusahaan kelapa sawit dan 13 % melibatkan industri plup dan kertas (Kinseng, 2022). Penyebab konflik masyarakat dan perusahaan khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit cukup beragam seperti perampasan lahan, tidak lengkapnya persetujuan FPIC (*Free Prior Informed Consent*) sebagai syarat perusahaan melaksanakan bisnis, klaim hak adat, kompensasi yang tidak memadai, dan dampak hadirnya perusahaan seperti polusi mulai dirasakan. Wujud konflik masyarakat dan perusahaan yaitu protes fisik, intimidasi dan ancaman. Umumnya

masyarakat menggunakan protes fisik bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, siaran pers atau menggunakan pihak untuk mengirimkan keluhan mereka. Pihak perusahaan terkadang menggunakan cara intimidasi dan ancaman untuk menggagalkan masyarakat yang sedang melakukan protes aksi dan keterlibatan polisi dan militer serta pengamanan perusahaan ikutserta di dalamnya yang mengakibatkan menggunakan kekerasan.

Persch-Orth dan Esther (2016), menyatakan Strategi yang digunakan untuk resolusi konflik masyarakat dan perusahaan kelapa sawit seperti mediasi yang melibatkan RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dengan intervensi dari *International Finance Corporation* dan *Compliance Advisor Ombudsman*, dan negosiasi, ataupun membawa kasus konflik untuk diselesaikan dipengadilan. Dalam mekanisme resolusi konflik terdapat empat tingkatan intensitas yaitu tanpa kekerasan, supresi, kekerasan dan letal. Negosiasi tidak dapat digunakan pada konflik kekerasan kematian tetapi melibatkan pengadilan dalam penyelesaiannya. Galsl (dalam Persch-Orth & Esther, 2016) menjelaskan kerangka kerja konflik yaitu resolusi sebagai pendekatan tergantung pada intensitas konflik tersebut, jika intensitasnya meningkat maka diperlukan pihak eksternal ini menyelesaikan konflik. Hal tersebut dikarenakan pihak yang berkonflik tidak memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan konfliknya sendiri.

Eskalasi konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan terjadi karena kurangnya dialog dan komunikasi, kepentingan pihak luar dan politik, durasi konflik dan kemajuan resolusi konflik, mobilisasi satuan keamanan, serta mundurnya salah satu pihak dalam proses resolusi konflik. Persch-Orth dan Esther (2016), juga menjelaskan penyelesaian konflik agar tidak terulang dengan memperkenalkan istilah Spiral Eskalasi. Kegagalan dialog dan komunikasi merupakan langkah pertama yang dapat

menyebabkan eskalasi dan mendingir terjadinya protes fisik. Dalam penyelesaian konflik khususnya konflik yang memungkinkan untuk terulang lagi atau telah berlangsung cukup lama yaitu sebagai berikut:

- a. Intervensi pemerintah
- b. Inisiasi dialog
- c. Komitmen tertulis dari pihak yang ingin menyelesaikan konflik
- d. Pemetaan lahan sengketa
- e. Membentuk tim pencari fakta
- f. Konsesnsi oleh perusahaan dalam bentuk pengembangan masyarakat dan dukungan keuangan
- g. Pemberehentian sementara operasional pada lahan yang bersengketa.

Dalam konflik masyarakat dan perusahaan yang digunakan yaitu negosiasi, mediasi dan pengadilan sebagai pihak ketiga yang sudah seharusnya bersifat netral. Keterlibatan penegak hukum seperti pengadilan atau pihak ketiga lainnya jika konflik yang terjadi melibatkan kekerasan.

2. Konflik Kelas

Konflik kelas di Indonesia salah satunya terjadi pada kelompok nelayan. Kinseng (2022), menjelaskan konflik nelayan terbagi atas dua basis kelas yaitu jenis relasi pada alat produksi yang menghasilkan kelas pemilik dan buruh dan relasi pada jenis alat produksi yang menghasilkan kelas nelayan besar, menengah dan kecil dan menyebabkan konflik sosial terjadi antar kelas. Karl Marx membagi fokus pada konflik kelas yang terjadi antara kelas pemilik alat produksi atau kapitalis dengan kelas buruh atau proletar. Konflik dapat terjadi ketika individu atau kelompok tertentu menunjukkan tujuan yang tidak sejalan (Kriesberg, 2009). Konflik nelayan dipicu oleh kebijakan, perebutan wilayah tangkap, perkembangan wisata dan lain-lain sehingga terdapat kegagalan dalam pemenuhan *livelihood*, *justice* dan *dignity* sehingga dalam pengelolaan konflik diperlukan jaminan sumber penghidupan,

keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat nelayan.

Perubahan sosial yang terjadi pada kelompok nelayan juga dapat menjadi pemicu konflik seperti modernisasi alat tangkap, kebijakan pemerintah, masuknya korporasi eksplorasi, dan pengembangan pariwisata. Penanganan konflik yang dilakukan pada kelompok nelayan yaitu negosiasi, mediasi atau adjudikasi, namun juga beberapa konflik diselesaikan dengan kekerasan. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia yang menunjukkan eskalasi konflik dengan nelayan besar yang melakukan protes terhadap kebijakan alat tangkap yang terkadang juga terdapat perusahaan yang terlibat di dalamnya.

KESIMPULAN

Mayoritas resolusi konflik yang dilaksanakan di Indonesia hanya sebatas negosiasi dan mediasi begitu pun pada konflik masyarakat dan perusahaan serta konflik kelas. Peran kedua resolusi tersebut memang cukup penting dalam mencegah eskalasi namun diperlukan juga sebuah kebijakan agar konflik yang sama tidak terulang di daerah lain dengan waktu yang lama. Mengingat konflik akan terus berkembang mengikuti proses perkembangan manusia.

Perlu ada perhatian khusus pada resolusi konflik dengan negosiasi ataupun mediasi agar tidak merugikan masyarakat khususnya menengah ke bawah. Pada konflik masyarakat dan perusahaan langkah awalnya berbentuk negosiasi dan mediasi namun jika gagal akan terjadi protes fisik yang tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga masyarakat itu sendiri. Konflik yang melibatkan kekerasan juga sudah tidak dapat di negoasiasikan dan di mediasikan namun harus melibatkan pihak ketiga untuk mengintervensi pihak yang berkonflik. Negosiasi dan mediasi merupakan resolusi yang efektif dalam mencegah eskalasi konflik, namun konflik

yang telah melibatkan kekerasan didalamnya maka harus ada kebijakan yang lebih tegas untuk mengatur hal tersebut. Peran pemerintah menjadi semakin penting

DAFTAR PUSTAKA

- Bouvier, H., & Smith, G. (2016). Violence in Southeast Asia. *Asian Journal of Social Science*, 34(3), 357–545.
- Burton, J. W. (1993). *Conflict Resolution As A Political System*. https://activity.scar.gmu.edu/sites/default/files/wp_1_burton_0_0.pdf
- CNN Indonesia. (2023). KPA: 660 Konflik Agraria Pecah Sepanjang Tahun 2020-2023 Imbas PSN Ada 150. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231017203725-12-1012525/kpa-660-konflik-agraria-pecah-sepanjang-2020-2023-imbaspn-ada-105>
- Hidayat, A. (2024). Konflik Agraria Terbesar 2023 Terkait Proyek Infrastruktur. *Katadata Media Network*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/18/konflik-agraria-terbesar-2023-terkait-proyek-infrastruktur#:~:text=Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria,kasus konflik agraria di Indonesia.>
- Kinseng, R. A. (2022). *Konflik dan Perubahan Sosial pada Komunitas Nelayan dan Pedesaan di Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/006144>
- Kriesberg, L. (2009). The SAGE Handbook of Conflict Resolution. In J. Bercovitch, V. Kremenjuk, & I. Zartman (Eds.), *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9780857024701>
- Wagner-Pacifici, R., & Hall, M. (2012). Resolution of social conflict. *Annual Review of Sociology*, 38, 181–199. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081309-150110>